

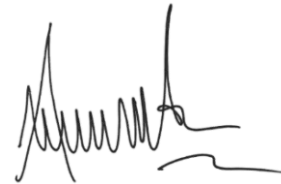
Persetujuan

Nama : DARREN ANDREAS
NIM : 207211001
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : ANALISIS UPAYA HUKUM KASASI PADA SENGKETA
PKPU DITINJAU BERDASARKAN TEORI KEPASTIAN
HUKUM (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
23/PUU-XIX/2021)

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 02-Januari-2023

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10208001



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ Upaya Hukum Kasasi Pada Sengketa PKPU Berdasarkan Teori Kepastian Hukum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021)”.Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Magister Hukum.

Dengan tersusunya tesis ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu ,membimbing dan memberikan dukungan kepada penulis hingga tesis ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
2. Prof.Dr Jeane Neltje S.H.,M.H.,APU., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
3. Ibu Kandidat Doktor Christine S. T. Kansil, S.H., M.Hum, selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Dr.Ariawan Gunadi,S.H., M.H., selaku Pimpinan Yayasan Tarumanagara dan dosen pembimbing tesis;
5. Dr.Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., selaku narasumber dalam penelitian ini;
6. Dr.Richard Adam,S.H., LL.M, selaku penguji sidang tesis penulis dan dosen di magister hukum Universitas Tarumanagara ;

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas ilmunya yang telah diberikan selama penulis berkuliah;
8. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Bapak Ali, Bapak Hafiz, Bapak Tri, Ibu Justa, Bapak Murdi;
9. Orang Tua yang dicintai, ayah penulis Herman Wiraputra dan ibu penulis Julina yang telah berkorban demi anaknya untuk menuntut ilmu dan selalu senantiasa memberikan kasih sayang, perhatian dan memberikan doa kepada penulis;
10. Saudara adik tersayang Miguel, Janet, Bryan atas dukungan, semangat dan doa untuk penulis;
11. Seluruh keluarga besar penulis yang memberikan perhatian, doa dan dukungan untuk mengerjakan tesis ini sampai selesai;
12. Teman-teman terkasih penulis yang selalu ada dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi, yaitu Calvin Edgar dan Iputra Andy;
13. Vanessa Nattawidjaja, yang selalu memberikan dukungan, doa dan perhatian di kala suka dan duka dalam proses pembuatan tesis;
14. Carissa Janice, yang selalu memberikan dukungan, doa dan perhatian dalam proses penulisan tesis;
15. Felicia Cangestu dan Phoenix, yang selalu memberikan dukungan, doa dan perhatian di kala suka dan duka dalam proses pembuatan tesis;
16. Teman-teman sekolah terkasih penulis, yaitu Reynhard Ivan Derian, Glen Igen, Jason Kusuma, Charles Febrianto dan Emmanuel Jason;

17. Grup Tawa Tiwi yang selalu menemani bermain dan memberikan sukacita dalam membuat tesis ini;
18. Grup GANS yang selalu memberikan sukacita dalam membuat tesis ini;
19. Semua pihak-pihak yang belum tertulis namanya , penulis yakin sudah sangat membantu dalam proses pembuatan tesis.

Penulis berharap agar tesis ini juga bermanfaat untuk ditemukannya penemuan baru di bidang hukum terutama di bidang hukum Kepailitan dan PKPU.

Jakarta, 25 Desember 2022

Darren Andreas

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR

ISI

iv

ABTRAK

vi

DAFTAR SINGKATAN

vii

BAB I

PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang

.....

1

B. Rumusan Masalah

.....

18

C. Tujuan Penelitian

.....

19

D. Kerangka Konseptual

.....

20

E. Kerangka

Teoritis

.....

21

F. Metode

Penelitian

.....

25

BAB II LANDASAN

TEORI

29

A. Uraian

Teori

.....

30

B. Teori Kepastian

Hukum

.....

31

C. Teori Keadilan

.....

39

1. Teori Keadilan

Aristoteles

.....

42

2. Teori Keadilan Thomas

Hobbes

.....

43

3. Teori Keadilan Hans

Kelsen

.....

44

D. Kepailitan dan

PKPU

.....

50

1. Pengertian

 Debitur

.....

51

2. Pengertian Badan

 Hukum

.....

53

3. Pengertian Kepailitan dan

 PKPU

.....

56

4. Asas-asas dalam Kepailitan dan

 PKPU

.....

69

5. Hubungan Kepailitan dan PKPU Dengan

 BW

.....

74

6. Syarat-syarat Kepailitan dan

PKPU

.....

76

7. Jenis-Jenis

Kreditur

.....

79

8. Akibat Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang

.....

85

9. Akibat Putusan

Pailit

.....

91

E. Upaya Hukum

Kasasi

.....

100

1. Definsi Upaya Hukum

Kasasi

.....

110

BAB III METODE PENELITIAN

115

A. Contoh Kasus

Posisi

.....

120

B. Hasil

Wawancara

.....

130

BAB IV ANALISIS

PERMASALAHAN

133

A. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Bila Adanya Upaya Hukum

Kasasi

Pada

PKPU

.....

133

B. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-
XIX/2021

.....

141

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

151

A. Kesimpulan

.....

151

B. Saran

.....

153

DAFTAR PUSTAKA

154

LAMPIRAN

ABSTRAK

- (A) Nama : Darren Andreas (207211001)
(B) Judul Tesis : Upaya Hukum Kasasi Pada Sengketa PKPU berdasarkan Teori Kepastian Hukum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021)
(C) Halaman : viii + 156 halaman, 2022
(D) Kata Kunci : Kasasi, PKPU, Kepastian Hukum
(E) Isi :

Abstrak: Pada dasarnya, PKPU memiliki tujuan guna menciptakan adanya rasa damai antara debitur dengan para kreditornya dan menjauhkan debitur yang telah atau akan mengalami insolven dari keputusan pailit. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, pasal di dalam Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 yang diuji adalah Pasal 235 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, Pasal 293 Ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1). Dengan adanya pasal-pasal tersebut, Pemohon mengalami kerugian konstitusional Pemohon sebab tak bisa mengajukan upaya hukum apapun yang pada akhirnya mendatangkan konsekuensi bahwa Debitur tidak diberikan hak untuk memegang kendali atas harta kekayaannya akibat putusan status pailit, padahal putusan PKPU yang berujung pailit tersebut hadir atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang tak cermat dan tak adil ketika mengimplementasikan hukum. Sehingga permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah Bagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditur bila adanya upaya hukum kasasi ini dan Bagaimana pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi nomor 23/PUU-XIX/2021 sejalan dengan teori kepastian hukum. Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yang didukung dengan data wawancara. Data Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila upaya kasasi ini diterapkan maka akan mengakibatkan kreditur itu sendiri yang akan berakhir pailit, kreditur mengajukan PKPU terhadap debitur agar utang-utangnya dapat dibayar sejalan dengan teori kepastian hukum tetapi dengan adanya upaya hukum kasasi akan semakin berlarut-larut pembayaran tagihan kreditur dan akan membuat sebuah lingkaran dimana kreditur-kreditur yang akan berakhir pailit karena utang nya tidak dibayar oleh debitur.

- (F) Acuan : 36 Buku (1975-2018), 6 Jurnal, 1 Kamus.
(G) Pembimbing : Dr. Ariawan Gunadi, S.H., MH
(H) Penulis : Darren Andreas

DAFTAR SINGKATAN

- 1) KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) PKPU adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 3) B.W adalah Burgelijk Wetboek
- 4) Rbg adalah Rechtreglement Voor De Buitengewesten
- 5) HIR adalah Herizen Inlandsch Reglement

ABSTRACT

- (A) Name : Darren Andreas (207211001)
(B) Thesis Title : Cassation Legal Remedies in PKPU Disputes based on the Theory of Legal Certainty (Study of Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021)
(C) Halaman : viii + 152 halaman, 2022
(D) Key words : Cassation, PKPU, Legal Certainty
(E) Content :

Abstract: between the debtor and his creditors and keeping debtors who have been or will be insolvent from the bankruptcy decision. In the decision of the Constitutional Court Number 23/PUU-XIX/2021, the articles in Law number 37 of 2004 that were tested were Article 235 paragraph (1) of Law 37 of 2004, Article 293 Paragraph (1), and Article 295 paragraph (1). With these articles in existence, The Petitioner suffered a constitutional loss of the Petitioner because he could not file any legal remedy which ultimately led to the consequence that the Debtor was not given the right to assume control of his property due to the bankruptcy status judgment, even though the PKPU judgment that led to the bankruptcy was present on the basis of inaccurate and unfair considerations when implementing the law. So that the problems discussed in this thesis are How is the legal protection for creditors if there is a remedy for this cassation law and how is the implementation of the constitutional court decision number 23 / PUU-XIX / 2021 in line with the theory of legal certainty. The research method in this thesis uses normative research methods supported by interview data. Data The results of the study show that if this cassation effort is implemented, it will result in the creditor itself which will end up bankrupt, the creditor files a PKPU against the debtor so that his debts can be paid in line with the theory of legal certainty but with the existence of legal remedies the cassation will be more protracted payment of creditors' bills and will create a circle where creditors who will end up bankrupt because their debts are not paid by the debtor.

- (F) References : 36 Books (1975-2018), 6 Journal, 1 Dictionary
(G) Supervisor : Dr.Ariawan Gunadi, S.H., MH
(H) Author : Darren Andreas